

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 13, NO. 2, DESEMBER 2022

ISSN: 2086-6313

KESIAPAN DIGITALISASI SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DI PASAR RAKYAT

Rizky Ramadini Febrinda dan Rahayu Ningsih

IMPACT OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT ON LOCAL AIR QUALITY

Dwi Setiyo Puryanti dan Muhammad Halley Yudhistira

PEMETAAN WILAYAH PROVINSI ACEH BERDASARKAN REALISASI PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI TAHUN 2017-2019

Rihadatur Rahmah, Samsul Anwar, Nurul Hidayati, and Irmawati

PENGARUH KEBIJAKAN PENGALIHAN BPHTB TERHADAP PENERIMAAN BPHTB KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2006-2019

Widya Sari dan Riatu Mariatul Qibthiyah

THE IMPACT OF GLOBAL LIQUIDITY ON MACROECONOMIC AND FINANCIAL VARIABLES OF SELECTED SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES: A PANEL VECTOR AUTOREGRESSION METHOD

Mahjus Ekananda

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Suryadi Jaya Purnama dan Chotib

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 13, NO. 2, DESEMBER 2022

ISSN: 2086-6313

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Abstrak	vii-xiii
KESIAPAN DIGITALISASI SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DI PASAR RAKYAT	
<i>Rizky Ramadini Febrinda dan Rahayu Ningsih</i>	87 - 100
IMPACT OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT ON LOCAL AIR QUALITY	
<i>Dwi Setiyo Puryanti dan Muhammad Halley Yudhistira</i>	101 - 112
PEMETAAN WILAYAH PROVINSI ACEH BERDASARKAN REALISASI PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI TAHUN 2017-2019	
<i>Rihadatur Rahmah, Samsul Anwar, Nurul Hidayati, dan Irmawati</i>	113 - 124
PENGARUH KEBIJAKAN PENGALIHAN BPHTB TERHADAP PENERIMAAN BPHTB KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2006-2019	
<i>Widya Sari dan Riatu Mariatul Qibthiyah</i>	125 - 136
THE IMPACT OF GLOBAL LIQUIDITY ON MACROECONOMIC AND FINANCIAL VARIABLES OF SELECTED SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES: A PANEL VECTOR AUTOREGRESSION METHOD	
<i>Mahjus Ekananda</i>	137 - 152
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA	
<i>Suryadi Jaya Purnama dan Chotib</i>	153 - 166

KATA PENGANTAR

Penghujung tahun 2022, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (JEKP) Pusat Penelitian Badan Keahlian SETJEN DPR RI kembali hadir menemani. Sebagai pembuka, tidak ada salahnya jika kami dari meja redaksi ingin menyampaikan bahwa di tahun ini terjadi peralihan dari Peneliti menjadi Analis Legislatif. Sebuah pilihan yang didorong oleh keinginan dan harapan untuk terus memperkuat dukungan substansi bagi pelaksanaan fungsi DPR RI. Sejatinya aktivitas dan output hasil analisis, kajian, pengumpulan data, dan penelitian diperuntukkan bagi penguatan tugas, fungsi, dan kewenangan DPR RI. Disamping itu juga turut mengembangkan keilmuan dan menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat luas untuk Indonesia maju dan berdaya saing. Dan JEKP menjadi salah satu produk yang dihasilkan. Edisi Desember tahun 2022 kali ini menyuguhkan 6 (enam) tulisan yang merupakan analisis ekonomi dan kajian kebijakan publik yang menjadi warna utama JEKP.

Tulisan pertama mengetengahkan tentang bagaimana “Kesiapan Digitalisasi Sistem Pembayaran Non Tunai di Pasar Rakyat” yang ditulis oleh Rizky Ramadini Febrinda dan Rahayu Ningsih. Adopsi sistem pembayaran non tunai di pasar rakyat dianggap penting serta berpotensi dalam penguatan pasar dan ekonomi rakyat sejalan dengan program revitalisasi pasar rakyat yang dicanangkan pemerintah. Menggunakan pendekatan kualitatif diagram *fishbone* disimpulkan bahwa perlu sosialisasi yang lebih intensif terkait manfaat, cara penggunaan dan jaminan keamanan sistem pembayaran kepada pembeli dan utamanya pedagang, disamping pendampingan secara berkesinambungan baik oleh pemerintah, PJSP maupun perbankan.

Tulisan kedua mengambil judul “Impact of Jakarta Mass Rapid Transit on Local Air Quality”. Judul tersebut dipilih Dwi Setiyo Puryanti dan Muhammad Halley Yudhistira, bermula dari kenyataan bahwa Jakarta menduduki peringkat pertama sebagai ibu kota dengan tingkat polusi udara tertinggi di Asia Tenggara (2019). Menggunakan metode *Difference-in-Difference* dan Indeks Standar Polusi Udara (ISPU) sebagai proksi kualitas udara dengan mengontrol beberapa faktor, seperti kondisi cuaca, penetapan hari libur nasional, akhir pekan, penulis mengungkapkan dua temuan utama. Pertama, beroperasinya MRT Jakarta Fase 1 di koridor 1 berdampak pada penurunan tingkat polusi udara sebesar 27,4 persen di area yang terdekat dengan jalur MRT. Kedua, hasil estimasi menunjukkan bahwa dampaknya terhadap penurunan polusi udara terjadi lebih kecil pada akhir pekan.

Tulisan ketiga mengkaji tentang bagaimana pengaruh kebijakan pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap penerimaan BPHTB kabupaten dan kota di Indonesia. Menggunakan pendekatan *fixed effect* (2006-2019), analisis yang dilakukan Widya Sari dan Riatu Mariatul Qibthiyah menunjukkan kebijakan pengalihan BPHTB terbukti berpengaruh signifikan dalam meningkatkan penerimaan BPHTB kabupaten dan kota di Indonesia.

Sementara itu, “Pemetaan Wilayah Provinsi Aceh Berdasarkan Realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 2017-2019” yang ditulis oleh Rihadatur Rahmah, Samsul Anwar, Nurul Hidayati, dan Irmawati, mengetengahkan bagaimana investasi berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Menggunakan metode *K-means clustering* pada data realisasi investasi Provinsi Aceh ditemukan bahwa meski mengalami peningkatan yang signifikan, namun investasi tersebut belum terdistribusi secara merata di seluruh kabupaten/kota sehingga perlu dilakukan upaya pendampingan dan monitoring dalam upaya meningkatkan iklim investasi daerah. Khususnya pada 15 daerah kategori rendah (65,2 persen), dilanjut 6 daerah kategori sedang (26,1 persen). Dan hanya 2 daerah (8,7 persen) masuk kelompok wilayah dengan tingkat investasi tinggi. Perlu juga disiapkan infrastruktur yang memadai, regulasi hukum dan aturan perizinan yang mudah terkait penanaman modal serta promosi potensi daerah akan membantu peningkatan iklim investasi di Provinsi Aceh.

Tulisan kelima berbicara mengenai tingkat keterbukaan keuangan di negara-negara maju dan berkembang di Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura) cenderung meningkat sejalan dengan melonggarnya peraturan devisa dan arus modal internasional. Menggunakan metode yang mempertimbangkan keberagaman keuangan beberapa negara Asia Tenggara (SEA), Penulis Mahjus

Ekananda dalam tulisannya yang berjudul “The Impact of Global Liquidity on Macroeconomic and Financial Variables of Selected Southeast Asian Countries: A Panel Vector Autoregression Method”, menunjukkan *shock* pada variabel VOX, GDP dunia, dan likuiditas dunia memengaruhi inflasi dan GDP di beberapa negara SEA. Pemerintah harus memerhatikan perubahan pada variabel-variabel yang akan memengaruhi GDP dan Inflasi. Sumber-sumber perdagangan dan dukungan faktor input produksi juga sangat diperlukan untuk mempertahankan GDP dan inflasi tetap terjaga.

Terakhir, tulisan keenam yang berjudul “Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara”. Tulisan tersebut merupakan hasil analisis yang dilakukan oleh Suryadi Jaya Purnama dan Chotib. Fokus analisis dilakukan terhadap aspek-aspek kebijakan mengenai pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Dimana lingkup bahasan mulai dari substansi, implementasi kebijakan, sampai dengan tanggapan dari para pemangku kepentingan. Pro dan kontra baru-baru ini dari pemindahan ibu kota terutama tentang biaya dan anggaran serta implikasi ekonominya termasuk potensi kegagalan, dampak sosial-ekologis, dan pembelajaran dari beberapa negara. Tulisan ini menyimpulkan bahwa kebijakan ini harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian, keakuratan informasi dan berbagai dinamika dalam implementasinya, sehingga perlu mempertimbangkan capaian beragam aspek dalam setiap tahapannya.

Demikian keenam tulisan terpilih yang sudah melalui proses panjang setelah mendapat masukan dan pertimbangan, baik dari Mitra Bestari maupun Editor. Beragam topik yang dibahas semoga dapat memberikan informasi dan sedikit-banyak menambah pengetahuan serta wawasan para pembaca. Harapan kami keenam tulisan di atas bermanfaat bukan hanya bagi para pembaca, tetapi juga dapat menjadi pertimbangan bagi Anggota DPR RI dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Terima kasih dan selamat membaca.

Jakarta, Desember 2022

Redaksi

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 13, NO. 2, DESEMBER 2022

ISSN: 2086-6313

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh difotokopi.

Rizky Ramadini Febrinda dan **Rahayu Ningsih** (Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan)

KESIAPAN DIGITALISASI SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DI PASAR RAKYAT

JEKP, Vol. 13, No. 2, Desember 2022, hal. 87 - 100

Abstrak

Revitalisasi pasar rakyat dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan daya saing pasar melalui peningkatan fasilitas dan sarana baik dalam hal kondisi fisik pasar, aspek ekonomi, budaya maupun aspek manajerial. Melihat perkembangan teknologi dan kebiasaan masyarakat, perkembangan dari segi ekonomi dengan melakukan adopsi sistem pembayaran non tunai di pasar rakyat dianggap penting serta berpotensi dalam penguatan pasar dan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, kesiapan dari ekosistem pasar rakyat serta upaya yang efektif dari pemerintah diperlukan agar implementasi dapat terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang diperlukan dalam hal kesiapan ekosistem pasar rakyat dalam menerima dan menerapkan sistem pembayaran non tunai. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif diagram *fishbone* yang disusun berdasarkan data dan informasi dari hasil studi literatur, wawancara mendalam (*indepth interview*) dan diskusi terbatas dengan *stakeholders*. Dari hasil analisis diagram *fishbone* disimpulkan bahwa faktor utama yang memengaruhi penerapan sistem pembayaran non tunai di pasar rakyat adalah kesiapan pedagang. Hal ini berdasarkan persepsi pedagang terhadap biaya dan kemudahan dalam pelaksanaan sistem pembayaran non tunai. Kesiapan pedagang dan pembeli dalam melaksanakan sistem pembayaran saat ini cukup banyak terlihat di kota besar. Hal ini dikarenakan kedua pihak telah memiliki pengalaman dan pemahaman terhadap manfaat dari penggunaan sistem pembayaran non tunai. Hasil studi menyarankan perlunya sosialisasi yang lebih intensif terkait manfaat, cara penggunaan dan jaminan keamanan sistem pembayaran terhadap pedagang dan pembeli. Selain itu perlu adanya pendampingan secara berkesinambungan baik oleh pemerintah, PJSP maupun perbankan.

Kata kunci: pasar rakyat, sistem pembayaran non tunai, diagram *fishbone*

Dwi Setiyo Puryanti dan Muhammad Halley Yudhistira (Magister of Economic Planning and Development Policy, University of Indonesia)

DAMPAK MODA RAYA TERPADU JAKARTA TERHADAP KUALITAS UDARA LOKAL

JEKP, Vol. 13, No. 2, Desember 2022, hal. 101 - 112

Abstrak

Moda Raya Terpadu Jakarta, atau MRT Jakarta merupakan transportasi publik berbasis kereta perkotaan pertama di Indonesia dengan beberapa jalur bawah tanah. Sejak 24 Maret 2019, MRT Jakarta Fase 1 (koridor Utara-Selatan) resmi beroperasi dan memiliki panjang jalur sekitar 16 kilometer yang terdiri dari tujuh stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah. Motivasi penelitian ini bermula dari kenyataan bahwa pada tahun 2019 Jakarta menduduki peringkat pertama sebagai ibu kota dengan tingkat polusi udara tertinggi di Asia Tenggara, di mana sektor transportasi darat menjadi salah satu sumber utama. Investasi pemerintah cukup besar untuk mengembangkan angkutan umum yang diharapkan dapat mengatasi kegagalan pasar ini. Namun, hasil penelitian untuk membuktikan manfaat pengoperasian MRT terhadap kualitas udara lokal masih terbatas, terutama untuk wilayah perkotaan di negara berkembang seperti Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode Difference-in-Difference dan Indeks Standar Polusi Udara (ISPU) sebagai proksi kualitas udara dengan mengontrol beberapa faktor-faktor, seperti kondisi cuaca, penetapan hari libur nasional, akhir pekan, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di masa pandemi Covid-19 yang melanda seluruh belahan dunia, penetapan tarif MRT secara bertahap, dan dengan memperhitungkan periode pembangunan jalur MRT. Penelitian ini mengungkapkan dua temuan utama. Pertama, beroperasinya MRT Jakarta Fase 1 di koridor 1 berdampak pada penurunan tingkat polusi udara sebesar 27,4 persen di area yang terdekat dengan jalur MRT. Kedua, hasil estimasi menunjukkan bahwa dampaknya terhadap penurunan polusi udara terjadi lebih kecil pada akhir pekan.

Kata kunci: Kualitas udara, MRT Jakarta, ISPU

Rihadatur Rahmah, Samsul Anwar, Nurul Hidayati, dan Irmawati (Jurusan Statistika, FMIPA Universitas Syiah Kuala)

PEMETAAN WILAYAH PROVINSI ACEH BERDASARKAN REALISASI PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI TAHUN 2017-2019

JEKP, Vol. 13, No. 2, Desember 2022, hal. 113 - 124

Abstrak

Investasi berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Realisasi investasi di Provinsi Aceh pada tahun 2019 mencapai Rp5,8 triliun atau naik sekitar 353,9 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun mengalami peningkatan yang signifikan, namun investasi tersebut belum terdistribusi secara merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh sehingga Pemerintah Aceh perlu melakukan upaya pendampingan dan *monitoring* terhadap seluruh kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan iklim investasi daerah. Langkah awal yang perlu dilakukan Pemerintah Aceh salah satunya adalah melakukan pemetaan investasi di setiap kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan nilai rata-rata realisasi investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri selama tahun 2017 hingga 2019. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh. Data dianalisis dengan menggunakan metode *K-means clustering* yang membagi data menjadi 3 kelompok yaitu rendah, sedang dan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 23 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh, masing-masing sebanyak 15 (65,2 persen), 6 (26,1 persen) dan 2 (8,7 persen) di antaranya masuk ke dalam kelompok wilayah dengan tingkat investasi kategori rendah, sedang dan tinggi. Pemerintah Aceh perlu melakukan pendampingan dan *monitoring* terutama terhadap 15 daerah dengan nilai investasi yang rendah tersebut. Penyediaan infrastruktur yang memadai, regulasi hukum dan aturan perizinan yang mudah terkait penanaman modal serta promosi potensi daerah akan membantu peningkatan iklim investasi di Provinsi Aceh.

Kata kunci: investasi, *k-means clustering*, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, Provinsi Aceh

Widya Sari dan Riatu Mariatul Qibthiyyah (Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia)

PENGARUH KEBIJAKAN PENGALIHAN BPHTB TERHADAP PENERIMAAN BPHTB KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2006-2019

JEKP, Vol. 13, No. 2, Desember 2022, hal. 125 - 136

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap penerimaan BPHTB kabupaten dan kota di Indonesia. Melalui kebijakan yang diatur dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri BPHTB di daerahnya masing-masing. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan *fixed effect* selama periode tahun 2006-2019 (tahun 2007 dikecualikan karena keterbatasan data) pada level kabupaten dan kota di Indonesia. Variabel utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *dummy* tahun mulai adanya data realisasi BPHTB pada Laporan Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten dan Kota sebagai proksi kebijakan pengalihan BPHTB. Hasil penelitian menunjukkan, kebijakan pengalihan BPHTB terbukti berpengaruh signifikan dalam meningkatkan penerimaan BPHTB kabupaten dan kota di Indonesia. Hal ini disebabkan antusiasme pemerintah daerah, terutama daerah yang memiliki potensi penerimaan BPHTB tinggi untuk menerima pengalihan. Strategi dan langkah pengalihan BPHTB dari pemerintah pusat ke daerah yang ditetapkan secara jelas dan konsisten juga menjadi faktor pendukung kebijakan pengalihan. Selain itu, sifat BPHTB yang *self-assesment* menyebabkan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan BPHTB lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan pengelolaan pajak lain seperti misalnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang memerlukan proses administrasi yang lebih rumit.

Kata kunci: desentralisasi fiskal, BPHTB, *fixed effect model*

Mahjus Ekananda (Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia)

DAMPAK LIKUIDITAS GLOBAL TERHADAP VARIABEL MAKROEKONOMI DAN KEUANGAN NEGARA-NEGARA TERPILIH DI ASIA TENGGARA: METODE PANEL VECTOR AUTOREGRESSION

JEKP, Vol. 13, No. 2, Desember 2022, hal. 137 - 154

Abstrak

Tingkat keterbukaan keuangan di negara-negara maju dan berkembang di Asia Tenggara cenderung meningkat sejalan dengan melonggarnya peraturan devisa dan arus modal internasional. Aliran modal masuk ke negara-negara berkembang di Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura) telah menunjukkan tren yang meningkat relatif terhadap PDB sejak berakhirnya krisis Asia. Sejalan dengan itu, kesadaran para pelaku ekonomi dan pembuat kebijakan di beberapa negara (Association of Southeast Asian Nations) ASEAN terhadap kerentanan kondisi ekonomi domestik terhadap fluktuasi likuiditas global juga semakin meningkat. Kami membangun metode yang mempertimbangkan keberagaman keuangan beberapa negara Asia Tenggara (SEA). Penelitian kami menganalisis respons Indeks Harga Saham, inflasi, indeks harga konsumen dan GDP di beberapa negara SEA akibat gangguan dari variabel global seperti VOX, GDP dunia dan likuiditas dunia. Artikel ini menerapkan model PVAR (*Panel Vector Autoregression*) karena dinamika dan hubungan endogenitas antar variabel. Data panel terdiri dari beberapa negara Asia Tenggara dari tahun 2003 hingga 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *shock* pada variabel VOX, GDP dunia, dan likuiditas dunia memengaruhi inflasi dan GDP di beberapa negara SEA. Implikasi penelitian sangat relevan dimana terjadi perubahan yang sangat cepat mengenai likuiditas global dan VOX saat ini. Pemerintah di beberapa negara SEA harus memerhatikan perubahan pada variabel-variabel ini yang akan memengaruhi GDP dan Inflasi di beberapa negara SEA. Sumber-sumber perdagangan dan dukungan faktor input produksi sangat diperlukan untuk mempertahankan GDP dan inflasi di beberapa negara Asia Tenggara tetap terjaga.

Kata kunci: *panel vector autoregression, global liquidity, impulse response function, cholesky decomposition*

Suryadi Jaya Purnama dan Chotib (Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia)

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

JEKP, Vol. 13, No. 2, Desember 2022, hal. 155 - 168

Abstrak

Pemerintah telah mencanangkan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur dan telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR RI pada awal Tahun 2022. Setidaknya terdapat lebih dari 6 pertimbangan utama mengapa pemindahan IKN penting untuk dilakukan. Namun pertimbangan tersebut dirasakan belum cukup untuk memindahkan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini akan mengkaji dan menganalisis aspek-aspek kebijakan publik mengenai pemindahan ibu kota negara dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, tulisan ini bukan hanya menganalisis substansi dan implementasi kebijakan saja, tetapi juga mengelaborasi tanggapan dari para pemangku kepentingan. Pro dan kontra dalam persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota terutama dalam hal pembiayaan/pendanaan serta bagaimana implikasi ekonominya, termasuk potensi kegagalan, dampak sosial-ekologis, dan pembelajaran dari beberapa negara. Penulis mengelompokkan dalam faktor pendorong dan faktor penghambat. Sebagai proyek publik besar dan penting, pembangunan dan pemindahan IKN memiliki potensi aspek ekonomi yang strategis melalui terwujudnya transformasi ekonomi dan Indonesia sentris yang akan melahirkan diversifikasi ekonomi dan *multiplier effect*. Namun demikian, potensi ekonomi yang besar harus tetap mempertimbangkan aspek sosiologis, aspek geografis, dan aspek geopolitik yang harus dilakukan antisipasi risiko yang mungkin muncul sebagai dampak susulan. Kata kunci: ibu kota negara, kepadatan penduduk, APBN, dampak ekonomi-sosial-budaya-ekologi, antisipasi risiko

Rihadatur Rahmah, Samsul Anwar, Nurul Hidayati, and Irmawati (Jurusan Statistika, FMIPA Universitas Syiah Kuala)

REGIONAL MAPPING OF THE ACEH PROVINCE BASED ON REALIZATION OF FOREIGN AND DOMESTIC INVESTMENT IN 2017-2019

JEKP, Vol. 13, No. 2, Desember 2022, pp. 113 - 124

Abstract

Investment has the potential to encourage the economic growth of a region. Realization of investment in Aceh Province in 2019 reached Rp5.8 trillion, an increase of around 353.9 percent compared to the previous year. Although there was a significant increase, the investment was not evenly distributed in all districts/cities in Aceh Province so that the Aceh Government needs to assist and monitor all districts/cities in an effort to improve the regional investment climate. One of the first steps that the Aceh Government needs to take is to map out investments in every districts/cities. This study aims to map the districts/cities in Aceh Province based on the average value of the realization of foreign investment and domestic investment during 2017 to 2019. The data employed were secondary data sourced from Aceh Investment and One Stop Integrated Service Office. The data were analyzed using the K-means clustering method which divided the data into 3 groups, namely low, medium and high. The results of the study showed that of the 23 regencies/cities in Aceh Province, 15 (65.2 percent), 6 (26.1 percent) and 2 (8.7 percent) of them were included in the regional group with the investment level category of low, medium and high, respectively. The Aceh Government needs to provide assistance and monitoring, especially to those 15 regions with low investment values. The provision of adequate infrastructure, proper regulations and easy licensing rules related to investment and promotion of regional potential will help improve the investment climate in Aceh Province.

Keywords: investment, k-means clustering, domestic investment, foreign investment, Aceh Province

Widya Sari and Riatu Mariatul Qibthiyyah (Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia)

BPHTB DEVOLUTION AND ITS EFFECT ON DISTRICT AND MUNICIPALITY BPHTB REVENUES IN INDONESIA DURING 2006-2019

JEKP, Vol. 13, No. 2, Desember 2022, pp. 125 - 136

Abstract

This study aims to determine the effect of land and building transfer tax (BPHTB) devolution on district and municipality BPHTB revenues in Indonesia. Through the policy enacted by Law Number 28 of 2009 concerning local taxes and charges (PDRD), local governments have devolved the authority to manage BPHTB in their respective regions. The analysis was carried out using the fixed effect method during the period 2006 to 2019 (2007 was excluded due to data limitations) at the district and municipality levels in Indonesia. The variable of interest used in this study is the dummy of the year when BPHTB realization data were found in the Local Statement of Budget Realization as a proxy for BPHTB Devolution Policy. The results showed that the policy was proven to have a significant effect on increasing district and municipality BPHTB revenues in Indonesia. This is due to the enthusiasm of local governments, especially those with high potential for BPHTB revenue, to implement the policy. The strategy and steps for transferring BPHTB from the central government to the regions that are clearly and consistently defined are also factors supporting the devolution policy. In addition, the self-assessment nature of BPHTB makes the role of local government in managing BPHTB easier than other tax management, such as land and building tax for rural-urban sector (PBB P2) which requires a more complicated administrative process.

Keywords: fiscal decentralization, BPHTB, fixed effect model

Mahjus Ekananda (University of Indonesia, Faculty of Economics and Business)

THE IMPACT OF GLOBAL LIQUIDITY ON MACROECONOMIC AND FINANCIAL VARIABLES OF SELECTED SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES: A PANEL VECTOR AUTOREGRESSION METHOD

JEKP, Vol. 13, No. 2, Desember 2022, pp. 137 - 154

Abstract

The level of financial openness in developed and developing countries in Southeast Asia tends to increase in line with the loosening of foreign exchange regulations and international capital flows. Capital inflows to developing countries in selected Southeast Asia (Indonesia, Malaysia, the Philippines, and Singapore) have shown an increasing trend relative to GDP since the end of the Asian crisis. The awareness of economic actors and policymakers in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) countries to the vulnerability of domestic economic conditions to fluctuations in global liquidity is also increasing. We developed a method that considers the financial heterogeneity of selected Southeast Asian (SEA) countries. Our research analyzes the response of the stock price index, inflation, consumer price index, and GDP in selected SEA countries due to disturbances from global variables such as VOX, world GDP, and world liquidity. This article applies the Panel Vector Autoregression model because of the dynamics and endogeneity between variables. The panel data consists of selected SEA countries from 2003 to 2019. The results show that the shock on the VOX variable, world GDP, and world liquidity affects inflation and GDP in selected SEA. The Governments in selected SEA countries must pay attention to changes in these variables that will affect GDP and inflation in selected SEA. Trade sources and support for production input factors are needed to keep GDP and inflation in selected SEA under control.

Keywords: panel vector autoregression, global liquidity, impulse response function, cholesky decomposition

Suryadi Jaya Purnama dan Chotib (Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia)

ANALYSIS OF THE NATIONAL CAPITAL RELOCATION POLICY

JEKP, Vol. 13, No. 2, Desember 2022, pp. 155 - 168

Abstract

The government has announced a plan to move the national capital (IKN) to East Kalimantan Province and which has agreed upon at the DPR RI Plenary Meeting in early 2022. There are at least more than six main considerations why moving IKN is important to do. However, these considerations are felt to be insufficient to move the IKN from DKI Jakarta to East Kalimantan. In this regard, this paper will examine and analyze public policy aspects regarding the relocation of the national capital using a qualitative descriptive approach. Therefore, this paper does not only analyze the substance and implementation of policies but also elaborates on the responses from stakeholders. Pros and cons in preparing, building, and relocating the capital, especially in terms of financing/funding and what the economic implications, including potential failure, socio-ecological impact, and lessons learned from several countries. The author classifies the driving factors and inhibiting factors. As a large and important public project, the development and transfer of the IKN has the potential for strategic economic aspects through the realization of an economic transformation and Indonesia-centric, that will give birth to economic diversification and multiplier effects. However, a large economic potential must still consider sociological aspects, geographical aspects, and geopolitical aspects, which must be carried out in anticipation of risks that may arise as a follow up impact.

Keywords: national capital, population density, APBN, economic-socio-cultural-ecological impact, risk anticipation